

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, namun nampaknya masih banyak kendala dan hambatan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah melalui masa perubahan kehidupan politik yang dikenal dengan masa Reformasi, bangsa Indonesia kini menikmati demokrasi yang ditandai dengan terbukanya kebebasan, ruang gerak publik yang luas (Indrayani dan Denny, 2006). Hal ini tercermin dalam pembagian kekuasaan dalam pemerintahan.

Pemisahan kekuasaan menurut fungsi secara horizontal menunjukkan perbedaan fungsi pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif (pemisahan kekuasaan). Pemilihan umum (pemilu) diperlukan untuk memutuskan siapa yang masuk cabang eksekutif dan legislatif. Pemilihan umum adalah proses dimana masyarakat secara langsung memilih kandidat, baik partai politik maupun individu, untuk menjadi wakil dari badan eksekutif dan legislatif. Pemilu menjadi panggung politik demokrasi. Calon pemimpin bersaing untuk mendapatkan dukungan suara masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hak Pilih Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan: Pasal 19(1) Definisi atau pembahasan warga negara menyatakan bahwa seorang Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun pada hari pemilihan. Siapa pun yang berusia di atas 10 tahun atau yang pernah/menikah berhak memilih.

Pemilihan umum adalah wahana masyarakat untuk memilih pemimpin/perwakilan yang dapat membawa kesejahteraan bagi rakyatnya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih, memilih baik calon eksekutif presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta

pemilihan bupati dan wakil presiden. Calon Bupati dan Anggota DPR yaitu DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

Indonesia menganut praktik demokrasi terbuka yang ditandai dengan pengangkatan anggota legislatif secara serentak. Diselenggarakannya pemilihan umum anggota parlemen pada 17 April 2019 merupakan terobosan bagi pemerintah untuk membuat pemilihan umum lebih efisien. Pilkada 2019 merupakan salah satu agenda penting di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara tepat menggambarkan sarana yang tersedia bagi masyarakat untuk memilih. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden bertindak secara langsung, terbuka, bebas, tertutup, jujur, dan adil.

Sejak diberlakukannya sistem pemilihan langsung, terutama sejak pemilihan kepala daerah dan DPRD, politik lokal di Indonesia telah menunjukkan fenomena politik yang tampak kontradiktif. Oleh karena itu, persaingan antar elit politik lokal dapat diartikan sebagai situasi yang menekankan berbagai perbedaan politik mereka untuk mengartikulasikan kepentingan kolektif kelompok sosial yang ingin mereka wakili.

Penyelenggaraan pemilu yang baik memang merupakan harapan masyarakat, dan kebebasan memilih dan kebebasan memilih akan menjadikan rakyat Indonesia sebagai mesin demokrasi yang lebih baik. Demokrasi, yang didefinisikan sebagai kekuasaan penuh, bertumpu pada rakyat serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi seringkali menghadapi tantangan dan cobaan yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai demokrasi. Banyaknya kasus kebijakan moneter yang beredar dan keterlibatan beberapa elit dalam mencampuri keputusan politik rakyat berarti pemilu telah kehilangan substansi sebagai wahana demokrasi. Pilihan rakyat ditentukan oleh elit sebagai lokomotif untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, calon membutuhkan sarana dan dukungan politik untuk memenangkan pemilihan umum. Dukungan terhadap seorang calon elektoral dapat datang dari berbagai kelompok, seperti partai politik, kelompok peserta, atau kelompok yang dibentuk oleh calon di luar politik. Calon Kongres menggunakan kelompok swadaya sebagai jaringan politik yang kuat untuk pemilihan yang sukses. (Denny, 2006, p.72), jaringan politik terbentuk dari berbagai ikatan politik yang dapat menghubungkan satu aktor politik dengan aktor politik lainnya dalam rangka menjalin ikatan politik yang erat. (Denny, 2006, p.75) juga menjelaskan bahwa dalam hubungan politik yang kuat terdapat interaksi politik yang berlangsung terus menerus yang saling berhubungan dengan tujuan dan harapan yang sama.

Jaringan politik dapat menjadi basis utama bagi calon kampanye. Media kampanye politik dapat dibedakan menjadi dua jenis: konvensional dan non-tradisional (John, 2004). Media kampanye tradisional sama dengan kedua kampanye yang menggunakan leaflet, pamflet, mimbar pidato, dan metode kampanye lainnya yang belum menggunakan media saat ini. Kampanye pemilu yang tidak konvensional, di sisi lain, akan menjadi lebih fleksibel dan modern dalam penggunaan media dan jaringan politik melalui metode baru yang berorientasi pada pemilih. Contoh model kampanye ini adalah koordinasi dukungan masyarakat, kampanye media sosial, kampanye advokasi, dll.

Studi tentang jaringan politik tetap menjadi perhatian saat ini (Cassel, 1993). Jaringan politik adalah hubungan yang terjadi dari satu orang ke orang lain, menciptakan hubungan politik antara keduanya. Suatu jaringan berawal dari suatu hubungan atau interaksi antara satu orang dengan orang lain dan dapat digunakan dalam proses perebutan kekuasaan oleh seorang individu atau kelompok dalam dunia politik. Efektifitas sosial dari individu dapat meningkatkan kepercayaan orang lain pada tiap individu serta kekuatan dari ikatan pada jaringan politik yang dibuat (Stephani dan Kaumudi, 2020).

Modal sosial yang digunakan oleh para kandidat muncul dari representasi yang mereka buat kepada publik, dan publik mempercayai mereka. Modal sosial ini nantinya akan membentuk jaringan. Jaringan berkembang sesuai dengan istilah orang-orang yang dipercaya masyarakat. Modal sosial merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam masyarakat berupa nilai dan norma yang diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan norma yang membentuk hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang ini adalah jaringan. Jaringan politik terbentuk ketika jaringan tersebut terkait dengan unsur-unsur politik. Salah satu jaringan politik yang dapat memperluas jangkauan kampanye adalah kerja para aktor politik yang bekerja membangun dan mengarahkan opini publik. Selanjutnya pada saat kampanye pemilu parlemen dibentuk kelompok-kelompok relawan atau kelompok penekan nonpartisan yang berperan sebagai aktor politik dalam mendukung calon anggota parlemen secara berpasangan (Hakim, 1995). Kelompok non-partisan ini biasanya merupakan gabungan dari anak-anak milenial dan tokoh agama yang mendukung untuk diundang berkampanye, sekaligus mulai memahami politik dan mendukung salah satu calon legislatif tersebut. kelompok adalah partisan Kelompok yang terpisah dari partai politik (Nugroho, 2011, p. 67). Dalam mengkampanyekan calon anggota parlemen, kelompok non-partai ini mudah dimobilisasi dan dapat menggerakkan kelompok lain untuk mendukung pencalonannya. Mobilisasi calon merupakan upaya yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat sebagai pemilih yang sah dalam pemilihan umum (Nugroho, 2011, p.68). Mobilisasi calon merupakan kegiatan penting dalam kampanye politik, karena peran mobilisasi calon dapat meningkatkan suara elektoral dan dukungan bagi pasangan calon.

Pengembangan komunitas nonpartisan yang mendukung kelompok politik tertentu sangat penting. Kelompok masyarakat ini dibentuk oleh kesamaan latar belakang. Dari komunitas pemuda hingga komunitas umum dapat dengan mudah terbentuk di wilayah manapun di Indonesia. Elit politik mulai tertarik untuk menjangkau langsung komunitas nonpartisan yang dapat mendukung debat

politik, karena potensi komunitas yang cukup besar memiliki dampak yang kuat pada masyarakat.

Merangsang pemikiran tentang kompulsi dengan berfokus tidak hanya pada kualitas yang dimiliki individu yang bersangkutan, tetapi juga pada ikatan antar individu – kompulsi melekat dalam cara hubungan sosial diatur. Hubungan sosial yang sistematis terjadi dan berulang dalam kondisi yang sama atau situasi atau konteks, meskipun hubungan sosial yang dimanifestasikan belum tentu diakui oleh pelaku. Di satu sisi menunjukkan bahwa konteks sosial (social content) membentuk jaringan sosial (subnetworks), sedangkan di sisi lain Levi-Strauss tidak memiliki apa yang disebutnya quasi-laws atau logika situasional atau struktur sosial yang meningkat. Ini adalah urutan keteraturan di mana keteraturan waktu dan ruang beroperasi, menentukan batas-batas tindakan, sikap, dan tindakan para anggotanya. Ini membawa fokus individu pada kompleksitas struktur dan perilaku organisasi.

Subunit sosial memiliki potensi sumber daya yang berbeda satu sama lain. Sumber daya yang tersedia tergantung pada kekhususan kegiatan yang merupakan kewajiban setiap subunit sosial. Ini berarti bahwa setiap kegiatan memiliki potensi atau peluang untuk membawa sumber daya organisasi tertentu atau imbalan nilai kepada anggotanya. Oleh karena itu, hampir semua subunit sosial dalam suatu organisasi cenderung memanfaatkan semua peluang yang ada dalam tugas untuk menghasilkan sumber daya atau imbalan organisasi yang diinginkan.

Posisi struktural aktor dalam jaringan sangat menentukan akses dan kontrol atas sumber daya. Mereka yang memiliki status struktural yang relatif tinggi memiliki akses dan kontrol atas kekuasaan dan penghargaan, atau lebih banyak sumber daya, daripada mereka yang memiliki status struktural yang relatif rendah. Dalam situasi seperti itu, kontak sosial (personal contact) menjadi penting bagi perilaku instrumental manusia.

Kontak sosial yang dimaksudkan adalah kontak sosial yang memberikan atau dapat memberikan pengaruh dan informasi untuk mencapai manfaat yang

diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat. Dengan melakukan itu, mereka mengaktifkan ikatan emosional dan hubungan kekuasaan. Ini berarti memodifikasi atau memanipulasi hubungan emosional dan kekuasaan yang tidak mengesampingkan kemungkinan membangun hubungan sosial dengan aktor entitas lain untuk melestarikan sumber daya yang tersedia. Karena hubungan sosial antara dua aktor tertentu tidak perlu hanya melibatkan satu jenis konten sosial dalam pengalaman hidup mereka. Meskipun pertukaran antara kedua aktor tersebut tampak sama (simetris), namun setelah dipertimbangkan dengan cermat, apa yang sebenarnya terjadi mungkin tidak demikian.

Tumbuh dan berkembangnya kekuatan politik merupakan fenomena politik nasional, sebagai kesadaran nasional yang muncul dari masa pra-kemerdekaan hingga perkembangan politik bangsa saat ini. Pembahasan politik dan demokrasi dalam sejarah perpolitikan nasional banyak mendapat perhatian dari kalangan akademisi, politisi, aktivis, dan masyarakat awam. Munculnya kekuatan politik merupakan manifestasi dan keragaman ideologi dan kepentingan yang muncul dalam masyarakat.

Peluang-peluang tersebut dapat diukur dari kesiapan finansial para petahana akibat kebijakan pemerintah, program pembangunan, politisasi birokrasi, dan mahalnnya biaya demokrasi langsung pada saat pemilu. Faktor lain yang tak terbantahkan adalah pragmatisme partai dalam tidak mengambil risiko untuk mendukung calon yang mungkin kalah. Ukuran lainnya adalah penguatan kebenaran publik (public confidence) terhadap kinerja incumbent. Selain itu, aturan rekrutmen penyelenggara pemilu yang lemah, dan ada kemungkinan pemilihan walikota dimanipulasi untuk kepentingan petahana. Peluang petahana untuk menang tergantung pada apakah petahana memperoleh dukungan dari elit lokal seperti pemimpin agama, pemimpin adat, atau masyarakat sipil lokal, selain dari dukungan dan operasi struktur partai yang mendukungnya, juga dapat disebabkan oleh kemampuan bawa (Judy, 2016). Hal ini dimaknai sebagai kemampuan incumbent untuk mengindoktrinasi atau merekrut elit lokal berdasarkan bentuk-bentuk kekuasaan yang diterapkan. Misalnya, mempelajari

elit lokal berbasis Pesantren dapat mengarah pada sinergi dengan kekuatan politik, terutama dalam mendukung petahana yang berjuang untuk tetap berkuasa.

Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum serentak untuk pertama kalinya, memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kota. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang Pilkada Serentak. Keputusan itu diambil terhadap pendanaan negara dalam menyelenggarakan pemilu, kebijakan yang merugikan pemilih, dan uang yang melibatkan pemilih. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan atau politisasi birokrasi dan perampangan jadwal kerja pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018. Ini adalah pedoman untuk menyusun risalah dewan negara bagian, provinsi dan kota. Ayat 2 (1) menyebutkan bahwa DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai peran dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut: Penetapan peraturan daerah b. Anggaran C. Pengawasan. Persaingan dalam politik begitu ketat bahkan banyak yang ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Tentu saja, semakin banyak partai politik baru muncul, semakin sulit untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Perlombaan untuk memenangkan kontes politik.

Dalam pemilihan parlemen Indonesia, para calon menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan simpati dan suara publik. Seperti yang dilakukan Donnie Anggun saat kembali menjadi incumbent Kongres. Tentu saja, dia memiliki strategi yang bisa dia gunakan untuk memenangkan tantangan. Bahkan pada Pilkada 2019 di Kapolres 1 Kabupaten Jombang. Tentunya melalui pengalaman – pengalaman dan waktu terbang yang sangat lama, ditambah dengan adanya kesamaan jaringan politik di setiap daerah – basis penduduk pun termasuk para petahana di daerah pemilihan 1 (Dapil 1). Untuk tim aktor yang sukses, komunitas sukarelawan adalah beberapa pemain politik kunci dalam membantu mereka memenangkan suara pemilih baru. Mereka juga akan memberikan citra aktor

politik yang baik. Di sisi lain, program kampanye yang mereka jalankan memiliki variasi untuk kelompok partisan yang berbeda, membuat jaringan kampanye politik menjadi lebih beragam.

Melalui jaringan politik, masyarakat dapat saling mengenal, memperoleh informasi, saling mengingat, saling membantu, dan melaksanakan atau memecahkan masalah. Jaringan adalah sumber utama pengetahuan yang mendasari untuk membangun kepercayaan (Ina, 2002). Media yang paling ampuh untuk membuka jaringan adalah pergaulan, dan pengertian umum membuka pergaulan dalam arti terbatas melalui media cetak dan elektronik. Penggunaannya di luar partai politik memakainya adalah umum baik dalam pemilihan presiden maupun anggota parlemen Indonesia (lihat Aspinall, 2014; Aspinall dan Sukmajati, 2015; Triantini, 2015). Tim pemenang didefinisikan sebagai tim yang membantu seorang kandidat memenangkan pemilihan dengan mencari suara untuk kandidat tersebut. Orang Indonesia biasa menyebutnya tim pemenang. Secara harafiah berarti sekelompok orang yang tugasnya memperjuangkan calon yang memakainya (Kapre, Kagubu, Walikota/Kawakot) untuk memenangkan suatu pemilihan, ada yang dibentuk oleh partai politik, ada pula yang dipilih oleh calon sendiri (Kamuscomplete.com). Tim sukses yang disusun sendiri oleh seorang kandidat adalah tim sukses yang mandiri karena sifatnya di luar sistem kepartaian.

Jombang merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan ada yang menyebutnya sebagai kota Santri. Hal ini juga mempengaruhi pemilihan pimpinan Jombang dimana masyarakat memilih pemimpinnya berdasarkan latar belakang agamanya. Pada Pilkada Kabupaten Jombang tahun 2018, pasangan calon nomor urut satu, yakni Munjida Wahab-Slumba, terbukti menjadi pemilih yang dominan. Mundjidah Wahab sendiri memimpin BU Muslimat NU Kabupaten Jombang. Melihat hasil penghitungan aktual dan quick count tim kemenangan di situs KPU, pasangan Munzida dan Slumba unggul 16,14 dari rivalnya yakni Nyono Sukhari dan Subaidi Mucitar. Pada Pilkada 2018, pasangan Munzida dan Surumba memperoleh 203.271 suara (49,67%), disusul

pasangan Nyono-Subaidi dengan 137.177 suara (33,51%), dan pasangan terakhir, Shafien-Choirul Anam memperoleh 68.964 suara (16 suara, 84%). Mundjidah-Sumrambah, pemenang kontes politik Jombang 2018, memperoleh suara terbanyak dari anggota NU Muslim yang mengetuai PC NU Jombang.

Mengingat kuatnya agama di Kabupaten Jombang, studi ini bisa dipahami kurang menguntungkan untuk pengangkatan karena ada calon anggota legislatif dari latar belakang agama minoritas yang terpilih sebagai anggota legislatif pada 2019. Menarik. Donnie Anggun dari partai PDIP adalah salah satu dari 574 calon legislatif Jombang. Donny Anggun sekarang menjadi DPRD Kab. Jombang terpilih kembali menjadi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten sejak 2014. Jombang tahun 2019. Donny Anggun adalah anggota parlemen Kristen. Terpilihnya kembali Bupati Jombang Donny sebagai anggota DPRD kontras dengan perolehan suara Bupati Jombang tahun sebelumnya. Pada tahun pertama pencalonan DPRD Jombang pada 2014, Donny mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di tiga daerah pemilihan, yakni Kecamatan Mojowarno, Mojoagung, Baleng dan Wonosalam. Donnie kemudian mencalonkan DPRD Jombang melalui Polres 1 untuk periode kedua. Daerah pemilihan termasuk Jombang dan Perongan, dengan hanya delapan kursi yang tersedia untuk anggota DPRD.

Sebelum mencalonkan diri di Dapil 1, Donny memiliki kedudukan legislatif di dapil 3 Kabupaten Jombang. Donny terpilih menjadi Legislatif pada dapil 3 periode 2014-2019. Selain itu, relasi yang kuat pada tempat kelahiran beliau juga membantu untuk memenangkan pemilihan tersebut dengan baik. Saat didapil 1 Donny merupakan hal baru karena berawal dari kepindahan rumah beliau ke daerah tersebut. Donny membangun hubungan dengan baik pada tempat Donny akan melakukan kontestasinya di daerah tersbut periode 2019-2024. Kebiasaan Donny untuk berkunjung ke lapangan dan desa-desa menyebabkan banyak orang mengetahui dan mendukung Donny pada pemilu tersebut. Selain itu, pada dapil 1 banyak sekali pondok pesantren yang ada dibandingkan dengan dapil 3 tempat berkontestasi dulu. Pada dapil 1 lebih kental dengan keagamanya daripada tempat kontestasi sebelumnya.

Studi ini berfokus pada jaringan politik yang digunakan oleh kelompok Kristen untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum di Kabupaten Jombang. Dengan mengangkat dirinya sebagai wakil suara rakyat, caleg tersebut akan mengamankan suara pada pemilihan parpol 2019, karena latar belakang agama caleg tersebut adalah Kristen, agama minoritas Jombang. Bagi seorang caleg, tim yang mengusung caleg merupakan bagian penting dari aktor politik untuk bisa meraih suara di masyarakat Jombang. Tim relawan calon legislatif ini tentu akan memberikan citra yang baik bagi aktor politik. Di sisi lain, mengingat masyarakat Jombang sendiri sangat religius, cara tim mengemas program kampanyenya pun beragam.

Hasil penelitian ini melihat kepentingan publik pendukung pendukung Donny Anggun dan menganalisis konteks karir terkait jaringan politik. Menjangkau pemilih untuk mengalahkan seluruh petahana adalah salah satunya, peran komunitas relawan nonpartisan yang dapat membantu memberikan suara pada pemilihan umum 2019. Kelompok-kelompok sosial ini tidak hanya memiliki karakteristik interaksi politik yang berbeda, tetapi juga mengembangkan metode dan strategi yang unik untuk mempengaruhi pemilih terhadap calon legislatif. Dalam kehidupan mereka yang masih dalam proses belajar demokrasi, seperti Indonesia, di mana transisi menuju demokrasi ditandai dengan dinamika politik yang cepat, persaingan, dan konflik elit, kelompok persahabatan telah sering terbukti sangat berpengaruh dalam kepercayaan. Komunitas relawan atau nonpartisan ini menjadi fenomena menarik dalam proses legislasi Kabupaten Jombang. Partisipasi dalam kampanye pemilu sangat membantu, terutama di Dapil 1. Mereka kini menjabat Wakil 1 DPRD Jombang.

Ini menunjukkan bahwa Donnie Anggun dapat memenangkan jaringan politik calon Muslim Jombang. Kabupaten Jombang merupakan wilayah dengan afiliasi keagamaan yang kuat, namun hal ini tidak menghalangi kerja para aktor politik yang berdedikasi pada konstruksi dan dapat memandu opini publik.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Apa saja jejaring politik yang digunakan oleh Donny Anggun untuk memperoleh kemenangan di dalam kontestasi pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Jombang?

1.2.2. Bagaimana beroperasinya jejaring politik Donny Anggun untuk memenangkan suara basis islam di Kabupaten Jombang?

1.2.3. Apa hambatan yang dilalui oleh Donny Anggun dalam memenangkan suara di basis islam di kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk menegetahui apa saja jejaring politik yang digunakan oleh Donny Anggun dalam memperoleh kemenangan di kontestasi pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Jombang.

1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana Donny Anggun mengoperasikan jaringan politik dalam memenangkan suara basis islam di Kabupaten Jombang.

1.3.3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dilalui oleh Donny Anggun untuk memenangkan suara basis islam di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat dan penulis berharap dapat memberikan manfaat tersebut bagi pembaca, peneliti selanjutnya, dan maupun bagi pengembang studi politik di Indonesia.

1. Secara umum, dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Donny Anggun memanfaatkan jejaring politik untuk memperoleh kemenangan di Pileg 2019 pada Kabupaten Jombang. Lalu, memperoleh pengetahuan tentang jaringan politik yang ada di dapil 1 Kabupaten Jombang. Serta,

dapat mengetahui hambatan yang didapat oleh legislative dalam memperoleh suara basis islam.

2. Secara praktek, dalam penelitian ini memberikan manfaat mengenai bagaimana realitas yang dilakukan oleh Donny Anggun di Pileg 2019 pada Kabupaten Jombang. Selain itu, sebagai sumber ilmu untuk mempelajari realitas Pileg di Kabupaten Jombang.

1.5. Kerangka Konseptual dan Teori

1.5.1 Kerangka Konseptual

1.5.1.1 Jejaring Politik

Jaringan politik sudah tidak asing lagi di benak masyarakat. Pada dasarnya, jaringan politik berakar pada kehidupan manusia dan harus mengandung unsur-unsur politik untuk kepentingan sesama manusia, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah jaringan, unit dasar dari setiap kompleks politik, peran yang ditempati oleh aktor sosial daripada individu. dan hubungan atau hubungan antara posisi-posisi ini.

Liputan media tentang politik sangat intens dan banyak diekspos oleh media, termasuk para pemimpin daerah, pemilihan presiden DPR dan DPRD. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi di mana setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan menyatakan pendapat mereka, komunitas yang berpengaruh harus, dengan anotasi tertentu, yang tentu saja diatur oleh undang-undang, mengenai hal-hal yang relevan dengan politik. secara tidak langsung. Secara etimologis, politik adalah poteia, akar kata polis yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti masyarakat atau negara yang merdeka, dan thea yang berarti masalah. Max Webber mendefinisikan politik sebagai upaya untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan melalui akal dan kekuatan sosial. Demikian pula, politik juga merupakan kegiatan atau sikap yang berkaitan dengan kekuasaan, yang

bertujuan untuk mempengaruhi beberapa bentuk tatanan sosial dengan mengubah atau mempertahankannya.

1.5.1.2 Kontestasi

Kata 'contest' berasal dari kata bahasa Inggris 'contest' yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Merriam-Webster, contest berarti kontroversi dan perdebatan. Ini juga Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V). Hal ini karena kata kontroversi berarti kontroversi atau perdebatan. Sistem penggalangan dukungan publik mengikuti ``sistem pasar" dengan runtuhnya sistem lama akibat gerakan reformasi pada tahun 1998 persaingan dan persaingan. Jadi penggunaan kata kontes dalam berita otomatis tidak tepat. Hal ini karena konteks berita dalam contoh ini berkaitan dengan persaingan, bukan perdebatan atau kontroversi. Bahkan dalam tesaurus bahasa Indonesia, kata tantangan tidak ada hubungannya dengan kata-kata. Di sisi lain, ada banyak pilihan kata yang dapat digunakan untuk menggantikan kata pertengkaran, tergantung konteksnya, misalnya pertarungan, ras, rivalitas, rivalitas, rivalitas.

Sekilas, istilah "contestation" tampaknya merupakan adaptasi bahasa Indonesia dari "contestation" bahasa Inggris. Bukankah 'pesaing' juga termasuk kata 'pesaing' ketika 'pesaing' berarti 'pesaing (perlombaan, pemilihan, dll.)' menurut KBBI? Namun justru inilah kesalahan dalam menggunakan istilah "persaingan". "Kontroversi" dijelaskan dalam kamus sebagai kata benda kata kerja negatif, yang berarti "berdebat, berselisih, berselisih" (untuk bersengketa). Jadi, "persaingan" berarti "permusuhan, kontroversi, atau debat" daripada "persaingan/pertarungan antar kandidat pemilu" seperti yang kita pikirkan. Dalam salah satu acuan definisi kontroversi, diberikan sinonim yang antara lain perselisihan, pertentangan, perdebatan, kontroversi, perselisihan. Di sini kita melihat bahwa "persaingan" sama sekali tidak ada hubungannya dengan calon presiden atau pemilihan kongres.

1.5.1.3 Jaringan Kekuasaan

Jejaring sosial dapat dibagi menjadi tiga jenis ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan sosial dalam masyarakat. Pertama, jaringan kekuasaan, yaitu jaringan hubungan sosial yang dibentuk oleh hubungan sosial yang berkuasa. Dalam jaringan kekuasaan, konfigurasi hubungan timbal balik antara aktor yang berpartisipasi baik disengaja atau diatur oleh kekuasaan. Jenis jaringan ini terjadi ketika mencapai tujuan yang diinginkan memerlukan tindakan kolektif dan penciptaan jaringan yang hampir permanen antar aktor. Dinamika ini biasanya ditujukan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unit sosial itu secara artifisial direncanakan atau dibangun dengan paksa. Jejaring sosial semacam itu membutuhkan pusat kekuatan yang terus-menerus meninjau kinerja unit sosialnya dan merestrukturisasinya untuk efisiensi. Kontrol informal tidak cukup dalam kasus ini. Masalahnya adalah bahwa jaringan ini lebih kompleks daripada jaringan sosial yang dibuat secara alami. Dengan demikian, jaringan sosial jenis ini tidak dapat mengandalkan kesadaran para anggotanya untuk secara sukarela dan tanpa paksaan memenuhi kewajibannya.

Kedua, jaringan kepentingan dibentuk oleh hubungan sosial yang melibatkan kepentingan. Jaringan kepentingan ini terbentuk melalui hubungan yang bermakna dengan tujuan tertentu atau spesifik. Jika tujuannya spesifik dan spesifik seperti B. Pengadaan pekerjaan, barang, atau jasa hubungan ini biasanya tidak berkelanjutan jika tujuan tersebut dicapai oleh pelaku. Struktur yang muncul dari jenis jaringan sosial ini cepat berlalu dan berubah-ubah. Sebaliknya, jika tujuannya tidak begitu spesifik dan spesifik, atau jika diulang berkali-kali, struktur yang terbentuk relatif stabil dan tahan lama.

Ketiga, jaringan emosional adalah jaringan yang terbentuk atas dasar hubungan sosial yang bermuatan emosi, yang dengan sendirinya menjadi tujuan dan perilaku sosial. Struktur yang dibentuk oleh hubungan emosional ini cenderung stabil dan bertahan lama. Hubungan sosial yang terbentuk cenderung

bersifat intim dan berkesinambungan. Beberapa aktor cenderung menyukai atau tidak menyukai aktor lain dalam jaringan. Oleh karena itu, tampaknya ada saling kontrol emosional yang relatif kuat antar aktor (Agusyanto, 1997, p. 26-28).

1.5.1.4. Daerah Pemilihan

Konsep daerah pemilihan (dapil) adalah bentukan administratif atau demografis suatu daerah. Setiap daerah atau daerah pemilihan diwakili oleh satu kursi atau lebih. Salah satu elemen yang menentukan sistem pemilu universal adalah lingkungan konstituen. Partai politik atau individu bersaing untuk mendapatkan kursi untuk mewakili daerah pemilihan ini dalam pemilihan umum. Namun, pemilih yang terdaftar di daerah pemilihanlah yang berhak menentukan pemenang dapil dalam pemilihan umum tersebut. Dengan daerah pemilihan yang jelas, pemilih yang memenuhi syarat dan terdaftar secara hukum dihormati sebelum, selama dan setelah pemilihan wakil. Pembentukan daerah pemilihan harus didasarkan pada asas persamaan antara warga negara yang sah dan pemerintah, yang dalam kajian pemilihan umum disebut *one person, one vote*. Penerapannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum ditunjukkan dalam penetapan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Setiap daerah pemilihan mendapat alokasi kursi sesuai dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah terjadinya konstituen yang *undervalued* atau *overvalued*. Dalam prakteknya biasanya ada batas toleransi karena tidak mungkin setiap daerah pemilihan memiliki populasi yang sama (Surbakti, 1992, p.67).

1.5.1.5 Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan anggota Dewan. Perwakilan Rakyat adalah. Dewan Perwakilan Rakyat beroperasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Nomor 7 Tahun 2017). .

Di negara demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Jadi, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Demokrasi ada di semua negara, tetapi demokrasi perwakilan tentu merupakan sistem di mana diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat (Ina dan Azhari, 2002:98). Melalui pemilu, rakyat memilih kursi di parlemen dan perwakilan organisasi di dalam pemerintahan.

Negara yang berbeda mungkin memiliki peran elektoral yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama untuk memilih wakil rakyatnya. Pemilu hanya dapat digunakan untuk memilih anggota parlemen, tetapi di beberapa negara digunakan untuk memilih pegawai negeri senior. Karena adanya pemilu yang demokratis, pelaksanaan kedaulatan rakyat terjadi secara alami tanpa manipulasi, sehingga suara rakyat dalam pemilu menjadi tidak sadar akan kesadaran dan kematangan pengambilan keputusannya.

Pemilihan Umum (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2019 akan diselenggarakan pada 17 April 2019 dan memilih 575 anggota parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) periode 2019-2024, berpartisipasi secara serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan anggota DPR tahun ini bertepatan dengan pemilihan presiden Indonesia 2019.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Relasi Sosial Politik

Relasi sosial politik merupakan suatu proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (hingga tingkat tertentu)

norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain (sutaryo, 2005, p.156). Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya adalah sifat manusia yang tidak pernah puas untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Sosialisasi politik juga terdapat interaksi antar manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya suatu kelompok dalam masyarakat karena dua sifat manusia yang bertentangan antara satu dengan yang lain, pihak satu ingin bekerjasama, sedangkan pihak lain cenderung bersaing dengan sesama untuk bisa berkuasa. Sosial politik adalah penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab, usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit, nominal, dan sikap, karakteristik kepribadian yang ada (Rush dan Althoff, 2008, p.35).

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal ataupun kontak dan tidak serta pengalaman kehidupan sehari-hari (Faturochman, 2018, p.67).

Menurut Rush dan Althoff (2002) jenis sosialisasi politik dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Sosialisasi primer, merupakan sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat melalui keluarga. Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
2. Sosialisasi sekunder, merupakan suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat

Kesimpulan dari penjelasan teori di atas adalah relasi sosial memiliki pengertian yang cukup luas, kajian relasi sosial politik di antaranya membahas bagaimana seorang kandidat dapat melakukan kontak pertama melalui keluarga dan berangsur angsu melalui orang terdekat hingga orang yang berhubungan dengan orang tersebut.

1.5.2.2 Jaringan Politik

Konsep jaringan politik secara harfiah merupakan suatu kekuatan jaringan sosial unit dasar dari sistem politik yang kompleks yang melekat tidak hanya pada individu atau kelompok saja melainkan posisi atau peran yang ditempati oleh aktor sosial dan hubungan atau koneksi antara posisi tersebut (Knoke, 1989, p. 25). Peran atau status adalah kumpulan dari hak, tugas, kewajiban, dan ekspektasi yang diartikulasikan dengan jelas dalam memandu perilaku khas orang yang mengambil posisi tersebut. Dalam sistem sosial seperti halnya peran bukan hanya label dalam serangkaian kegiatan tetapi juga menunjukkan bagaimana seorang yang memiliki peran tersebut dapat berinteraksi dengan peran lain dalam situasi yang sesuai. Hubungan ini mengacu pada konstanta perilaku dan pada kualitas tertentu dari interaksi antara orang-orang yang menempati posisi peran yang berbeda (Nadel, 1957).

Setiap peran sosial untuk pasangan tertentu, aturan atau norma perilaku biasanya menentukan aktor (istilah umum untuk kesatuan entitas sosial, apakah individu atau kolektivitas yang lebih besar, seperti perusahaan atau Negara) yang lebih mungkin untuk mematuhi perintah yang lain. Terdapat komponen utama dari analisis jaringan yaitu terbentuknya suatu hubungan relasi antar aktor-aktor yang berhimpun didalamnya. Terbentuknya hubungan tersebut tidak terlepas dari seberapa besar pengaruh yang terjalin antara satu aktor dengan aktor yang lain. Analisis jejaring dalam kajian ilmu politik telah digunakan terutama dalam gerakan sosial, perilaku pemilih, kekuasaan organisasional, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat (Knoke, 1994, p.45).

Struktur hubungan antara aktor dan lokasi aktor individu dalam jaringan memiliki konsekuensi perilaku, persepsi, dan sikap yang penting baik untuk unit individu maupun untuk sistem secara keseluruhan (Knoke dan Kuklinski, 1982). Aktor sendiri merupakan sebuah entitas sosial kesatuan yang memiliki peran yang cukup besar. Hal tersebut menggambarkan karakteristik aktor dalam hubungan kekuasaan. Setiap aktor memiliki karakteristiknya masing-masing dalam menjalin hubungan politik dengan aktor yang lainnya. Dalam hubungan jejaring politik yang sudah terjalin, aktor-aktor yang terlibat mempunyai tujuan dan kepentingannya masing-masing. Selain aktor, setiap kelompok juga memiliki kepentingannya masing-masing.

Jejaring politik dapat terjalin berdasarkan arah hubungan dari para petinggi kelompok dengan aktor pemerintah dan seberapa besar pengaruh yang mereka dapatkan dari terjalinnya hubungan jejaring tersebut. Terbentuknya model jejaring yang tinggi dalam sebuah interaksi antar individu disebabkan karena adanya suatu faktor kepercayaan (Nee and Ingram, 1998). Faktor kepercayaan yang terjalin, tujuan politik yang selaras, kedekatan yang dilatarbelakangi oleh kesamaan sebuah organisasi, kesamaan ideologi akan menghasilkan jejaring politik yang sangat tinggi antara kepentingan kelompok dengan pemerintah dalam mewujudkannya. Dalam hubungan jejaring politik, seseorang yang diperintah akan mematuhi perintah dari atasan dengan berbagai cara. Hal ini membuktikan bahwasannya terjadi sebuah interaksi antara aktor sosial yang saling membutuhkan.

Ketika mempertimbangkan hubungan kekuasaan yang terjadi antara banyak aktor dalam sistem politik yang besar, gagasan jaringan sosial sangat membantu, karena unit dasar dari sistem politik yang kompleks bukan individu melainkan adanya hubungan atau koneksi dari aktor tersebut dan tujuan dasar dari analisis struktural politik adalah untuk menjelaskan distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor dalam suatu sistem sosial sebagai fungsi dari posisi yang mereka tempati dalam satu atau lebih jaringan.

Kekuatan posisi (kemampuannya untuk menghasilkan efek yang diinginkan pada sikap dan perilaku aktor lain) muncul dari keunggulannya dalam jaringan di mana informasi berharga dan sumber daya yang langka ditransfer dari satu aktor ke aktor lainnya (Wei Li Qun, 2012). Posisi distratifikasi sesuai dengan ketergantungan posisi lain pada mereka untuk sumber daya penting ini. Tidak hanya hubungan langsung yang penting dalam menentukan kekuatan posisi, tetapi hubungan tidak langsung sangat penting karena meliputi batas dan peluang untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

Pendekatan struktural terhadap kekuasaan mengharuskan analisis menilai keunggulan suatu posisi dengan mempertimbangkan tidak hanya koneksi langsungnya tetapi juga koneksi tidak langsungnya dalam jaringan yang lengkap. Dua konsepsi keunggulan dapat dibedakan menurut jenis hubungan pertukaran yang dianggap membuat posisi aktor terlihat oleh anggota sistem (Knoke dan Burt, 1983). Posisi paling sentral dalam jaringan adalah yang melibatkan banyak ikatan timbal balik dengan aktor lain. Bintang jaringan memperoleh kekuasaan karena mereka dekat dengan banyak aktor sistem, pada dasarnya, dengan berbaring di antara posisi yang harus digunakan untuk mengirimkan pesan dan barang (Freeman, 1977).

Hampir semua analisis politik adalah strukturalis tanpa disadari, karena mendefinisikan kekuatan sosial terutama pada istilah relasional. Definisi formal kekuatan sosial secara eksplisit menunjukkan dimensi relasional ini, kekuasaan adalah kemungkinan dimana satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi untuk melaksanakan kehendaknya sendiri meskipun ada perlawanan, terlepas dari dasar yang menjadi dasar kemungkinan ini (Weber, 1947). Kekuasaan pada dasarnya bersifat situasional, dinamis dan berpotensi tidak stabil. Selain paksaan, kekerasan, dan paksaan, kepatuhan sukarela dapat berubah secara nyata dari waktu ke waktu, bahkan berbalik secara dramatis di antara kelompok aktor yang sama.

Hubungan kekuasaan adalah *asymmetrical actual or potential interactions* di mana satu aktor sosial memberikan kontrol yang lebih besar atas perilaku orang lain. Namun, definisi umum semacam itu mengungkapkan sedikit tentang bentuk-bentuk yang dapat diambil oleh hubungan kekuasaan dalam kehidupan sosial. Beberapa skema diperlukan untuk mengatur keragaman hubungan politik. Yang disajikan di sini menetapkan semua hubungan kekuasaan sebagai kombinasi dari dua dimensi mendasar: pengaruh dan dominasi.

Pertama, pengaruh hanya mungkin terjadi ketika komunikasi terjadi di antara aktor-aktor sosial; satu aktor harus mengirimkan pesan ke yang lain dan aktor kedua harus menerima, memecahkan kode, menafsirkan, dan bereaksi terhadap pesan itu. Sanggahan dan kontra dapat terjadi sebelum resolusi akhir dan kepatuhan tercapai. Aspek intersubjektif dari pengaruh politik ini mengharuskan saluran komunikasi yang bermakna dibangun dan dipelihara di antara para aktor. Para aktor tidak hanya harus berbicara dalam bahasa formal yang sama, tetapi mereka harus berbagi pemahaman konotatif tentang kata-kata dan simbol yang digunakan dalam wacana politik - kebebasan, kesetaraan, keadilan, perdamaian, negara, bendera, kemakmuran. Pengaruh hanya mungkin jika persepsi situasi dapat dibingkai dengan cara yang menarik bagi khalayak.

Kedua, dominasi adalah hubungan di mana satu aktor mengontrol perilaku aktor lain dengan menawarkan atau menahan beberapa keuntungan atau kerugian. Dengan kata lain, satu aktor menjanjikan atau benar-benar memberikan sanksi (hadiah atau hukuman) kepada aktor untuk mendapatkan kepatuhan terhadap perintah. Sanksi dapat berupa peristiwa fisik (kenaikan gaji, jalan raya baru, eksekusi saat matahari terbit), tetapi mungkin juga melibatkan simbol-simbol yang terutama tidak berwujud (bendera yang didesain ulang, pujian, ejekan di halaman editorial). Jelas, dominasi hanya dapat terjadi jika dominee responsif terhadap sanksi. Bahkan ancaman kematian mungkin tidak efektif untuk mendapatkan kepatuhan, seperti dalam kasus para martir agama dan politik. Dominasi jelas bersifat relasional, karena melibatkan satu aktor yang menukar beberapa sumber daya yang berharga (atau dibenci) untuk dipatuhi oleh aktor lain.

Ketika pengaruh dan dominasi terjadi secara bersamaan, hubungan kekuasaan mengambil bentuk kekuasaan otoritatif, yaitu dikeluarkannya suatu perintah dengan harapan ketaatan yang tak terbantahkan oleh penerimanya. Meskipun kepatuhan sukarela dapat dijamin dengan biaya rendah dengan memberikan informasi yang menarik bagi kepentingan pribadi penerima pesan, harapan akan manfaat atau ancaman perampasan tidak pernah sepenuhnya hilang dari hubungan otoritas apa pun. Otoritas selalu berusaha untuk menyelubungi tangan besinya dengan alasan yang manis. Basis di mana bawahan mematuhi atasan mereka mungkin cukup beragam, yang mengarah ke berbagai sistem yang kompleks.

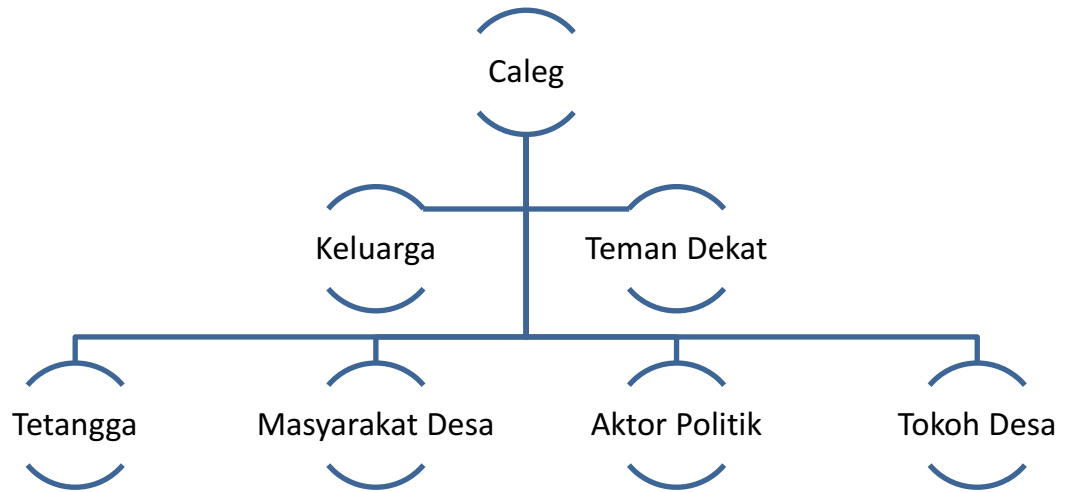
Analisis struktural dari jaringan pengaruh dan dominasi dapat mengungkapkan bagaimana proses sosialisasi dan sanksi benar-benar beroperasi untuk menghasilkan orientasi normatif dalam konteks situasi di mana tindakan politik berlangsung. Relasi struktural dapat menangkap dinamika di antara aktor-aktor politik purposive yang terkendala untuk menerima, menolak, dan berinovasi terhadap norma-norma perilaku yang baru. Tanpa bukti nyata dari peran yang ditempatkan secara struktural, argumen konformitas normatif ditakdirkan untuk menjadi penggambaran tindakan sosial yang menyesatkan sebagai perilaku yang terlalu disosialisasikan. Dengan mempertimbangkan hubungan struktural, penjelasan untuk berbagai jenis tindakan politik dapat menentukan mekanisme eksplisit untuk menghasilkan kesesuaian dan penyimpangan. Dengan demikian, pendekatan struktural memiliki keunggulan simultan dalam memberikan bentuk konkret pada perspektif kesesuaian normatif, sekaligus mengungkap keterbatasannya.

Struktur kekuasaan komunitas berasal dari pola informasi dan pertukaran sumber pengetahuan dan informasi yang memungkinkan organisasi mendapatkan kekuatan untuk mewujudkan kepentingan bersama-sama. Model jejaring menurut Knoke (1994) sering digunakan dalam kajian ilmu politik, pusat perhatiannya ialah kekuasaan. Bahwasannya satuan dasar sistem politik yang rumit bukanlah individu, melainkan kedudukan atau peran yang dimiliki oleh aktor sosial serta

hubungan dan keterkaitannya dengan kedudukan-kedudukan tersebut. Knoke (1994) juga menjelaskan bahwa kekuasaan bukanlah sebuah properti atau atribut yang melekat dalam diri individu atau kelompok. Kekuasaan merupakan suatu aspek interaksi aktual atau potensial antara dua atau lebih aktor sosial. Menurut Knoke (1994) terdapat dua bentuk mendasar. Dari kekuasaan berdasarkan aspeknya yaitu pengaruh (*influence*) dan dominasi (*domination*). Pengaruh dapat terjadi ketika seorang aktor secara sengaja menyampaikan informasi kepada individu atau kelompok lain untuk merubah tindakan sesuai dengan informasi diberikan aktor tersebut dan dominasi dapat terjadi ketika seorang aktor mengendalikan perilaku aktor lain dengan menawarkan sebuah keuntungan (*benefit*) atau kerugian (*harm*). Jika bentuk-bentuk mendasar dari kekuasaan ini digabung akan menghasilkan empat kategori kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan koersif
2. Kekuasaan otoritatif
3. Kekuasaan egalitarian
4. Kekuasaan persuasive

Dengan memperhatikan pola ikatan di antara orang – orang yang menghubungkan organisasi, mereka mengalihkan fokus dari reputasi dan atribut individu ke konfigurasi total antar organisasi. Pandangan alternatif tentang struktur kekuasaan masyarakat tergantung pada komponen dualitas mana yang ditekankan: 1. Organisasi berfungsi sebagai arena di mana orang – orang dengan populasi bersama bertemu untuk mengkoordinasikan strategi bersama mereka. Struktur kekuatan komunitas adalah alat yang melaluinya kepentingan pribadi dan keluarga dapat terwujud. 2. Orang-orang berfungsi sebagai hubungan antar organisasi berdasarkan keanggotaan bersama mereka. Struktur kekuatan masyarakat adalah pola pertukaran informasi dan sumber daya yang memungkinkan serangkaian organisasi mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan bersama (Knoke, 1989, p.85).



Jaringan interaksi, terjalin dengan dan bergantung pada yang lain jaringan seperti ekonomi, kekerabatan, agama, dan perang, antara yang sama atau tumpang tindih kumpulan orang. Dengan demikian mereka tunduk pada tekanan seleksi di berbagai lingkungan jaringan secara bersamaan, bahkan saat membentuk lingkungan tersebut. Apa yang kita lihat sebagai perubahandi tingkat mana pun organisasi atau spesies dapat dikonseptualisasikan sebagai tip dalam jaringan yang mendasari ini karena keadaan atau gangguan, yang dapat memindahkan antara sistem simbiosis ("regulasi") dan kontradiksi ("konflik"). Kebaruan terjadi ketika ikatan atau jaringan ditransposisikan di seluruh jaringan, yang dapat mengarah pada inovasi. Ketika inovasi mengalir di seluruh domain jaringan mereka menjadi penemuan. Dengan demikian, ikatan bukan sekadar saluran pasif, melainkan bersifat transformatif, mengubah produk melalui aturan produksi dan informasi melalui protokol komunikasi. Kami sebagai analis dapat memilih untuk memusatkan perhatian kami pada gangguan ("kontingensi"), keseimbangan ("struktur"), individu ("agensi"), atau bagian lain dari yang menarik. Tetapi fokus pada mekanisme umpan balik dan bagaimana mereka menghalangi atau memungkinkan kebaruan memberikan jendela ke genesis tingkat organisasi dan negara bagian, evolusi, dan kebaruan melalui waktu. Ini adalah cara terbaik untuk

memahami bagaimana sistem apapun (berfungsi dengan baik atau tidak) meluncur dalam evolusi melalui waktu. Simpul dan ikatan dalam karya jejaring sosial bukanlah titik dan garis; mereka adalah residu beku dari hubungan transformasional: Dalam jangka pendek, aktor membuat hubungan; dalam jangka panjang, hubungan membuat aktor.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Bersifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pemaparan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang karir politik yang berhubungan dengan jaringan apa saja yang dibentuk untuk memberikan interest kepada konstituen oleh Donny Anggun dengan cara mencari hal – hal baru yang mungkin belum ditemukan oleh peneliti – peneliti lainnya melalui dokumen – dokumen yang dimiliki oleh peneliti sendiri.

Dengan tipe ini, diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan terstruktur terkait karir politik dalam melihat peran jejaring politik dalam mendukung kemenangan Donny Anggun untuk mendapatkan suara dari masyarakat Jombang yang berbasis islam. Dengan demikian dapat menghasilkan sebuah penelitian yang menjadi referensi karir aktor dalam jaringan politik dengan peran – peran yang mendukung.

1.6.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berpusat kepada karir aktor politik yakni Donny Anggun yang mana merupakan anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga selaku wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang periode 2019-2024. Donny anggun selagu anggota legislatif yang menjabat di kursi parlemen sebanyak 3 periode dengan berlatar

belakang agama kristiani terpilih Kembali pada periode 2019-2024. Maka dari itu penulis hendak mengetahui seberapa besar karir jaringan politik yang telah dibangun oleh Donny Anggun untuk mendapatkan kursi parlemen ketiga kalinya di kabupaten Jombang.

1.6.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini tertuju pada peran jaringan elit di Daerah Pilihan 1 Kabupaten Jombang yang mana memiliki pengaruh besar dalam kontestasi politik khususnya pemilihan calon legislatif 2019. Bentuk pengaruh jaringan politik dalam kontestasi calon legislatif 2019 dan melihat bentuk tatanan pada keagamaan yang membentuk adanya kepercayaan pada calon legislatif yang beragama minoritas pada daerah tersebut. Dalam penelitian ini dibutuhkan adanya subjek penelitian, subjek penelitian adalah informan. Informan merupakan narasumber yang dapat memberikan sebuah informasi dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan peneliti dalam proses penelitian.

Informan dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti, alasan peneliti menentukan informannya karena informan tersebut dianggap mampu memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan yang dipilih juga merupakan informan yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan utama yang sangat membantu dalam pemberian informasi yaitu Bapak Donny Anggun yang mana beliau sebagai calon legislatif terpilih pada tahun 2019 dan 2024 dimana beliau adalah yang merupakan calon legislatif dengan latar belakang agama minoritas.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data dan pendukung yang berasal dari luar dan dalam. Penulis menggunakan dua macam pengumpulan data yaitu;

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antar periset dan responden. Dimana menjawab responden akan menjadi data mentah. Menurut Steard “Secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya”.

Wawancara memiliki tiga yaitu: standar, semi standar, dan tidak terstandarisasi. Tidak terstandarisasi ini bisa dikatakan tidak terstruktur, yang mana dapat mengimplikasikan bahwa daftar pernyataan itu muncul begitu saja tanpa ada perencanaan.

2. Studi Dokumentasi

Data yang dihasilkan dari wawancara terkadang tidak cukup, maka peneliti perlu melakukan studi dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Teknik studi dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Teknik studi dokumentasi ini bertujuan untuk mengungkap data non-insani, misalnya buku pedoman, catatan, surat-surat keputusan, laporan kegiatan, dan sebagainya.

1.6.5 Jenis Data

Di dalam jenis data ini, terdapat dua jenis data yang didapat oleh peneliti, yang pertama adalah data-data utama yaitu primer serta data sekunder sebagai data sampingan untuk lebih melengkapi data primer pada penelitian ini

1. Data Primer

Data primer yang biasa disebut sebagai data utama dari setiap penelitian ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok utama yang nantinya akan ditanyakan kepada informan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada informan untuk mendapatkan data utama sebaiknya diatur secara berurutan agar informan mudah dalam menjelaskan permasalahan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat untuk mendukung data-data primer. Data sekunder didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku harian, notulen rapat perkumpulan, dokumen-dokumen resmi dari berbagai macam instansi daerah.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Karena teknik ini memiliki peluang lebih besar untuk mengeksplorasi keyakinan dan sikap responden. Lalu metode ini menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana” bukan hanya sekedar “apa”.

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar tersusun rapi dimana dimulai dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta kumpulan bahan-bahan yang didapat untuk menunjang penelitian. Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan:

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.
2. Paparan data, penyusunan data dalam satu kesatuan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncuk dari data yang harus diuji kebenarannya.

Dalam proses unit analisis data yang dilakukan pertama kali adalah menentukan tokoh-tokoh desa yang membantu, partai dan tim sukses suatu calon legislatif. Lalu juga mentranskrip hasil wawancara dan ditata dengan baik sesuai urutan pertanyaan permasalahan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pemetaan dan penyederhanaan data, kemudian dilakukan penyusunan data agar tersusun rapi. Langkah selanjutnya adalah penganalisis hasil temuan data dengan menghubungkan teori yang relevan, setelah itu mulai menyusun suatu kesimpulan.